



Katalog BPS : 3201002.5103

DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010



**BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG
BPS KABUPATEN BADUNG**

DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010

ISBN : 979.473.100.5
No. Publikasi : 51032.11.01
Katalog BPS : 3201002.5103
Ukuran Buku : 17,6 cm x 24,99 cm
Jumlah Halaman : 63 + viii halaman

Naskah : Seksi Statistik Sosial

Penyunting : Seksi Statistik Sosial

Diterbitkan oleh :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung

Jln. Mulawarman No. 11, Telp (0361) 437519, Fax (0361) 411887,

Denpasar 80111

E-mail : bps5103@bps.go.id

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

SAMBUTAN KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG

Om Swastyastu,

Puji Syukur kami panjatkan ke hadapan Ida sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, publikasi Distribusi Pendapatan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Badung Tahun 2010 dapat terbit sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Publikasi yang menyajikan kajian kondisi Distribusi Pendapatan dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Badung ini, dapat dipergunakan sebagai referensi seluruh *stakeholder* untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan mengambil kebijakan pembangunan, khususnya di bidang ketenagakerjaan dengan *trend* semakin tingginya laju pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Badung.

Kepada semua pihak yang berkontribusi sehingga publikasi ini dapat terwujud, kami mengucapkan terima kasih. Semoga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk perencanaan pembangunan di Kabupaten Badung.

Om, Shanti, Shanti, Shanti, Om.

Mangupura, Desember 2011

Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Badung



 I Wayan Suambara, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19631025 198810 1 002

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan yang Maha Esa atas rahmat-Nya penyusunan publikasi Distribusi Pendapatan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Badung Tahun 2010 telah dapat diselesaikan tepat waktu.

Publikasi ini merupakan salah satu kajian ekonomi makro untuk dapat menjelaskan disparitas hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Publikasi ini mengungkapkan beberapa perbedaan yang terjadi antar wilayah karena adanya perbedaan struktural maupun perbedaan geografis yang menguntungkan.

Disadari masih terjadi beberapa kelemahan dalam analisa data karena kurang mendalamnya analisis yang ada, untuk itu kritik dan saran untuk perbaikan ke depan kami terima dengan senang hati.

Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini kami sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga buku ini ada manfaatnya.

Om, Shantih, Shantih, Shantih, Om

Badung, Desember 2011
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Badung



Ir. Dewa Made Suambara, MMA
NIP. 19661003 199212 1 001

DAFTAR ISI

Sambutan Kepala Bappeda Litbang	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Ruang Lingkup	4
BAB II METODOLOGI	5
2.1. Kerangka Sampel	5
2.2. Rancangan Sampel	6
2.3. Metode Pengumpulan Data	7
2.4. Konsep dan Definisi	7
BAB III KONSEPSI TEORITIS	12
3.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan	12
3.2. Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Distibusi Pendapatan	16
3.3. Ukuran Distribusi Pendapatan	19
a. Koefisien Gini/ <i>Gini Ratio</i>	19

b. Kriteria Bank Dunia	21
3.4. Ketenagakerjaan	22
BAB IV POLA KONSUMSI	25
4.1. Pengeluaran Perkapita	25
4.2. Pola Konsumsi	27
a. Pola Konsumsi Makanan	31
b. Pola Konsumsi Non Makanan	36
BAB V DISTRIBUSI PENDAPATAN	40
BAB VI KETENAGAKERJAAN	46
6.1. Gambaran Umum Ketenakerjaan	46
6.2. Profil Pekerja	49
6.3. Profil Pengangguran	55
6.4. Profil Setengah Menganggur	57
a. Setengah Menganggur Terpaksa	57
b. Setengah Menganggur Sukarela	59
BAB VII KESIMPULAN	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Penduduk Kab.Badung (000 Rp) Menurut Klasifikasi Daerah, Tahun 2006–2010	26
Tabel 2.	Proporsi Pengeluaran Penduduk Kabupaten Badung Menurut Kelompok dan Jenis Pengeluaran, 2010	29
Tabel 3.	Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Badung Menurut Jenis Pengeluaran dan Klasifikasi Daerah, Tahun 2006 - 2010	30
Tabel 4.	Proporsi Pengeluaran Penduduk Kabupaten Badung Untuk Kelompok Makanan Menurut Jenis Komoditi dan Klasifikasi Daerah, Tahun 2010	34
Tabel 5.	Proporsi Pengeluaran Penduduk Kabupaten Badung Untuk Kelompok Makanan Menurut Jenis Komoditi, 2006 - 2010	35
Tabel 6.	Proporsi Pengeluaran Penduduk Kabupaten Badung Untuk Kelompok Non Makanan Menurut Jenis Komoditi Dan Klasifikasi Daerah, 2010	38
Tabel 7.	Proporsi Pengeluaran Penduduk Kabupaten Badung Untuk Kelompok Non Makanan Menurut Jenis Komoditi, Tahun 2006 dan 2010.....	39
Tabel 8.	Perkembangan Nilai <i>Gini Ratio</i> Kabupaten Badung Tahun 2005 - 2010	41
Tabel 9.	Distribusi Pendapatan Kabupaten Badung Berdasarkan Kriteria Bank Dunia, Tahun 2006 – 2010	43
Tabel 10.	Ketimpangan Pendapatan Antara Daerah Perkotaan dan Perdesaan Di Kabupaten Badung, Tahun 2006 – 2010	45

Tabel 11.	Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Badung, Tahun 2007 – 2010	48
Tabel 12.	Jumlah Penduduk Kabupaten Badung Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja (000 orang) Menurut Lapangan Usaha Utama, Tahun 2007 – 2010	51
Tabel 13.	Jumlah Penduduk Kabupaten Badung Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja (000 orang) Menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 2007 – 2010	52
Tabel 14.	Jumlah Penduduk Kabupaten Badung Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja (000 orang) Menurut Jumlah Jam Kerja, Tahun 2007 – 2010	53
Tabel 15.	Jumlah Penduduk Kabupaten Badung Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja (000 orang) Menurut Status Dalam Pekerjaan Utama, Tahun 2007 – 2010	54
Tabel 16.	Setengah Menganggur Terpaksa Menurut Sektor dan Status Dalam Pekerjaan Utama, Tahun 2010	58
Tabel 17.	Setengah Menganggur Sukarela Menurut Sektor dan Status Dalam Pekerjaan Utama, Tahun 2010	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kurva Lorentz	21
Gambar 2.	Pola Konsumsi Penduduk Kab. Badung Menurut Jenis Pengeluaran, 2006 - 2010	28
Gambar 3.	Proporsi Pengeluaran Penduduk Kabupaten Badung Menurut Jenis Komoditi Untuk Kelompok Makanan, Tahun 2010	32
Gambar 4.	Proporsi Pengeluaran Penduduk Kabupaten Badung Menurut Jenis Komoditi Untuk Kelompok Non Makanan, Tahun 2010	37
Gambar 5.	Perkembangan <i>Gini Ratio</i> Kab. Badung, 2007, 2010	42
Gambar 6.	<i>Gini Ratio</i> dan Distribusi Pendapatan Kabupaten Badung, Tahun 2006 – 2010	44
Gambar 7.	Penduduk Kabupaten Badung Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, Tahun 2010	50
Gambar 8.	Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, Tahun 2010	55
Gambar 9.	Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 2010	56

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah besar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingginya tingkat kemiskinan yang ditandai dengan besarnya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*).

Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara-negara berkembang, negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relatif kecil dibandingkan dengan negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka relatif tinggi. Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah menjadi permasalahan bagi dunia internasional.

Berbagai upaya untuk meminimalisir kesenjangan pendapatan dan tingkat kemiskinan terutama di negara-negara miskin dan

berkembang telah dan sedang dilakukan baik dalam bentuk bantuan maupun pinjaman dari dunia internasional. Namun perlu disadari bahwa kesalahan dalam pengambilan kebijakan untuk memanfaatkan bantuan maupun pinjaman tersebut justru akan berdampak buruk pada kondisi sosial ekonomi negara yang bersangkutan.

Mengukur pendapatan masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah, oleh karena itu Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan penghitungan pendapatan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran/konsumsi masyarakat. Hal ini didasari oleh paradigma bahwa bila pendapatan mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh berbagai kebutuhan yang semakin banyak sehingga menuntut pengeluaran yang semakin tinggi pula. Menurut Ernest Engel, "Bila selera tidak berubah maka persentase pengeluaran untuk makanan akan menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan". Meningkatnya pendapatan masyarakat akan menggeser pola konsumsi masyarakat dari lebih banyak mengkonsumsi makanan menjadi lebih banyak mengkonsumsi bukan makanan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apabila persentase pengeluaran masyarakat untuk makanan telah menurun dari tahun-tahun sebelumnya hal itu dapat menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat mulai mengalami peningkatan.

Di sisi lain, kondisi makro perekonomian juga dipengaruhi oleh kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Beberapa indikator ketenagakerjaan seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sering digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Gambaran ini juga sangat penting bagi perencana pembangunan, pengambil

kebijakan maupun pemerhati masalah sosial ekonomi dan kependudukan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Kajian ini dibuat dengan maksud untuk mendapatkan gambaran umum kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Badung terutama ditinjau dari sisi pola konsumsi dan distribusi pendapatan serta kondisi umum ketenagakerjaan pada tahun 2010.

Adapun tujuannya untuk mengungkapkan beberapa indikator ekonomi makro sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan di Kabupaten Badung. Secara spesifik publikasi ini mempunyai tiga tujuan yaitu :

- a. Mengetahui pola konsumsi penduduk di Kabupaten Badung menurut klasifikasi daerah perkotaan dan pedesaan.
- b. Menghitung distribusi dan kesenjangan pendapatan penduduk Kabupaten Badung menurut klasifikasi daerah perkotaan dan pedesaan.
- c. Memberikan gambaran ketenagakerjaan di Kabupaten Badung dan menghitung indikator-indikator ketenagakerjaan untuk membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan terutama yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat.

1.3. Ruang Lingkup

Publikasi ini menggunakan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2010 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2010. Survei ini dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Adapun sampel untuk Kabupaten Badung sebanyak 640 rumah tangga yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Badung.

<http://badungkab.bps.go.id>

BAB II METODOLOGI

2.1. Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan dalam Susenas 2010 terdiri dari dua jenis, yaitu: kerangka pemilihan sampel primer (*primary sampling unit*) dan kerangka pemilihan sampel sekunder (*secondary sampling unit*). Kerangka pemilihan sampel primer adalah daftar blok sensus biasa (BS) hasil pemetaan dalam rangka persiapan Sensus Penduduk 2010 (SP2010) yang didokumentasikan dalam Daftar SP2010-RD. Informasi yang digunakan untuk melengkapi kerangka sampel adalah banyaknya kepala keluarga (KK), dan muatan blok sensus dominan (pemukiman biasa, pemukiman mewah, pemukiman kumuh). Selain itu, kerangka sampel juga dilengkapi dengan klasifikasi desa/kelurahan, yaitu: daerah perkotaan (*urban*) dan daerah perdesaan (*rural*). Klasifikasi desa/kelurahan yang digunakan adalah klasifikasi desa/kelurahan tahun 2010. Kerangka pemilihan sampel sekunder adalah daftar rumah tangga biasa hasil *listing* SP2010 dalam blok sensus.

Kerangka sampel yang digunakan Sakernas 2010 adalah daftar blok sensus terpilih Sakernas 2007 berikut daftar nama kepala rumah tangga hasil *update listing* Agustus 2009 Blok sensus sebagai *first stage sampling unit* dan rumah tangga sebagai *second stage sampling unit*. Blok sensus dalam kerangka sampel dapat dipilah menjadi dua kelompok, yaitu blok sensus terpilih untuk estimasi tingkat provinsi (periode pencacahan Februari 2010), dan blok sensus komplemen (periode pencacahan Agustus 2010 yang bukan merupakan blok sensus

Februari 2010) yang bila ditambahkan kedalam blok sensus untuk estimasi provinsi dapat digunakan untuk estimasi tingkat kabupaten/kota. Kerangka sampel ini digunakan untuk periode pencacahan (Februari dan Agustus) dalam tahun 2008-2010.

2.2. Rancangan Sampel

Rancangan penarikan sampel Susenas 2010 adalah rancangan penarikan sampel dua tahap berstrata. Yang digunakan sebagai strata adalah klasifikasi desa/kelurahan, yaitu: desa/kelurahan perkotaan (*urban*) dan desa/kelurahan perdesaan (*rural*). Ukuran sampel yang telah ditetapkan ditujukan untuk estimasi tingkat kabupaten/kota. Penarikan sampel antar strata dilakukan secara terpisah (*independent*). Sebelum penarikan sampel, blok sensus diurutkan menurut muatan dominan blok sensus, yaitu pemukiman bias, mewah dan kumuh.

Prosedur penarikan sampel Susenas 2010 untuk suatu kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a. Tahap pertama, memilih n_h blok sensus dari N_h secara pps (*probability proportional to size*) dengan *size* banyaknya KK.
- b. Tahap kedua, memilih sejumlah rumah tangga biasa ($m = 16$) pada setiap blok sensus terpilih secara sistematis berdasarkan hasil *listing* SP2010. Seluruh rumah tangga terpilih Susenas 2010 akan dicacah dengan kuesioner KOR (Daftar VSEN2010.K) pada bulan Juli 2010.

Untuk kegiatan Sakernas dilakukan pembentukan paket-paket blok sensus. Blok sensus dalam kerangka sampel yang digunakan untuk estimasi tingkat provinsi dibagi menjadi empat gugus sampel blok sensus yang berukuran sama dan tidak saling tumpang tindih (*non*

overleaping) secara sistematis yang digunakan untuk kegiatan pencacahan pada bulan Februari setiap tahunnya, sedangkan kelompok blok sensus komplemen dibagi menjadi dua paket sampel yang digunakan sebagai blok sensus tambahan untuk kegiatan pencacahan pada bulan Agustus setiap tahunnya. Pembentukan gugus sampel blok sensus antara daerah perkotaan dan perdesaan dilakukan secara terpisah (*independent*). Pemutakhiran daftar rumah tangga (*update listing*) dilakukan di setiap periode pencacahan yang dilanjutkan dengan pemilihan rumah tangga sampel.

2.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara langsung dengan responden. Wawancara dibedakan menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama menanyakan keterangan tentang rumahtangga kepada kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga yang mewakilinya, dan tahap kedua menanyakan keterangan individu kepada masing-masing anggota rumah tangga.

2.4. Konsep dan Definisi

- a. Koefisien Gini/*Gini Ratio* adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan suatu masyarakat/bangsa atau suatu daerah/negara. Semakin tinggi nilai *gini ratio* maka semakin timpang distribusi pendapatan di suatu daerah. Sebaliknya semakin rendah nilai *gini ratio* maka semakin merata pula distribusinya.
- b. Kurva *Lorenz* didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan hubungan antara persentase kumulatif banyaknya

rumah tangga/penduduk dan persentase kumulatif pendapatan yang diterima oleh berbagai lapisan masyarakat.

- c. Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.
- d. Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
- e. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.
- f. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak putus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
- g. Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, mogok kerja dan sebagainya.
- h. Pengangguran terbuka terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (*An ILO Manual on Concepts and Methods*).

- i. Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan.
- j. Mempersiapkan usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang “baru”, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar.
- k. Setengah penganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu).
- l. Setengah penganggur terpaksa adalah setengah pengangguran yang masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
- m. Setengah penganggur sukarela adalah setengah pengangguran tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (sebagian pihak menyebutnya sebagai pekerja paruh waktu/*part time worker*).
- n. Sekolah adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan. Tidak termasuk yang sedang libur sekolah.
- o. Mengurus rumah tangga adalah kegiatan seseorang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah.
- p. Kegiatan lainnya adalah kegiatan seseorang selain di atas, yakni mereka yang sudah pensiun, orang-orang yang cacat jasmani (buta, bisu, dsb) yang tidak melakukan suatu pekerjaan seminggu yang lalu.

- q. Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan adalah lamanya waktu dalam jam yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan, tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan selama seminggu yang lalu.
- r. Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Lapangan pekerjaan pada publikasi ini didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2005).
- s. Jenis pekerjaan/jabatan adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang bekerja atau sementara tidak bekerja. Jenis pekerjaan pada publikasi ini didasarkan pada Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia (KBJI 2002) yang mengacu pada ISCO 88.
- t. Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit/kegiatan, yang dibedakan menjadi 7 kategori:
- Berusaha sendiri adalah bekerja/berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
 - Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar adalah bekerja/berusaha resiko sendiri dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap.

- Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar adalah berusaha atas resiko dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.
- Buruh/karyawan/pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang.
- Pekerja bebas di pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/instansi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.
- Pekerja bebas di non pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/instansi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.

BAB III

KONSEPSI TEORITIS

3.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun (Sadono, 1985:19), sehingga untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus dibandingkan pendapatan nasional dari berbagai tahun yang dihitung berdasarkan harga konstan dan harga berlaku.

Sementara itu menurut Boediono (1999), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang yang dipengaruhi oleh dua aspek yaitu output total dan jumlah penduduk. Output perkapita adalah output total dibagi jumlah penduduk. Aspek ketiga dari definisi pertumbuhan ekonomi adalah perspektif waktu jangka panjang. Kenaikan output perkapita selama satu atau dua tahun, yang kemudian diikuti penurunan output perkapita bukanlah pertumbuhan ekonomi. Suatu perekonomian dikatakan tumbuh apabila dalam jangka waktu lima tahun mengalami kenaikan output perkapita.

Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya (Dumairy, 1997:54). Distribusi pendapatan dibedakan menjadi dua ukuran pokok, yaitu: distribusi ukuran, adalah besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang dan distribusi fungsional atau distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi (Todaro, 2000:180).

Pertumbuhan ekonomi versus distribusi pendapatan merupakan masalah yang menjadi perhatian di negara-negara sedang berkembang (Arsyad, 2004). Banyak negara mulai menyadari bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dirasakan tidak banyak memberi manfaat dalam pemecahan masalah kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan terutama ketika tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut justru diikuti dengan peningkatan pengangguran dan pengangguran semu baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. Distribusi pendapatan antara kelompok kaya dengan kelompok miskin semakin senjang. Pertumbuhan GNP perkapita yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Hasil-hasil penelitian pertama mengenai hubungan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang dilakukan oleh Prof. Simon Kuznets dari Universitas Harvard menunjukkan bahwa proses pembangunan ekonomi pada tahap awal pada umumnya disertai oleh kemerosotan yang cukup besar dalam pembagian pendapatan, yang baru berbalik menuju suatu pemerataan yang lebih besar dalam distribusi pendapatan pada tahap pembangunan lebih lanjut yang digambarkan melalui kurva U terbalik (*inverted U curve*).

Untuk mempercepat pemerataan terjadi, Sigit Hananto (1980) mengemukakan pembangunan ekonomi yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi hendaknya ditunjang dengan tingkat tabungan yang tinggi untuk memungkinkan adanya akumulasi modal.

Berkenaan dengan hal di atas, Both Anne dan Sundrun dalam Arndt (1983) melihat ada dua masalah yang agak jelas, yaitu : (1)

Terdapat indikasi bahwa orang kaya di negara seperti Indonesia memang benar-benar membelanjakan kekayaan baru mereka, untuk dinikmati sendiri daripada menabung atau menginvestasikannya. (2) Di pihak lain, sejumlah penduduk Indonesia mempunyai pendapatan yang rendah dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, dan perumahan. Selanjutnya disimpulkan bahwa untuk menjamin seluruh sektor dalam masyarakat agar memperoleh manfaat pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu yang panjang diperlukan peningkatan investasi pada kegiatan yang secara langsung produktif, dan harus diikuti pula dengan kemajuan dalam prasarana pendidikan sehingga seluas mungkin masyarakat dapat mengambil bagian dalam proses pembangunan.

Todaro (2000) mengatakan meskipun laju pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis dapat memberi jawaban atas berbagai macam persoalan kesejahteraan, namun hal tersebut tetap merupakan unsur penting setiap program pembangunan realistik yang sengaja dirancang untuk mengentaskan kemiskinan.

Jika dilihat dari hasil penelitian dan data-data statistik dalam dasawarsa yang lalu, akan terlihat bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi telah berjalan dengan pesat namun pertumbuhan yang pesat ini telah membawa akibat yang mengkhawatirkan, yaitu terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan yang lebih buruk. Meskipun pertumbuhan mampu mengurangi persentase penduduk miskin namun di lain pihak sebagian penduduk miskin menjadi semakin miskin. Dengan demikian, Indonesia belum termasuk kelompok negara-negara berkembang yang telah berhasil dalam menggabungkan pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan distribusi pendapatan yang makin merata

serta pengurangan kemiskinan absolut yang lebih pesat. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk melaksanakan pemerataan hasil-hasil pembangunan harus terus dilakukan oleh pemerintah. Pemerataan berarti suatu pembagian hasil produksi kepada masyarakat yang lebih merata, sehingga dirasakan keadilannya

Kenyataan bahwa Indonesia belum mampu melaksanakan pemerataan pembangunan mengharuskan kita untuk juga memikirkan cara lain yang perlu ditempuh agar Indonesia dalam tahun-tahun mendatang lebih berhasil dalam menanggulangi masalah ketimpangan distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan juga adalah strategi pembangunan alternatif yang dapat diterapkan di Indonesia dengan menggabungkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.

Kecenderungan peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi tidak saja terjadi di negara-negara sedang berkembang saja, namun juga terjadi di negara-negara industri maju. Studi dari Jantti (1997) dan Mule (1998) dalam Tambunan (2001) memperlihatkan bahwa perkembangan ketimpangan pendapatan antara kaum kaya dan kaum miskin di Swedia, Inggris, Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya di Eropa Barat menunjukkan suatu kecenderungan peningkatan selama dekade 1970 dan 1980-an. Dari studi Jantti disimpulkan bahwa semakin besarnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan di negara-negara tersebut disebabkan oleh pergeseran-pergeseran demografi, perubahan pasar buruh dan perubahan kebijakan-kebijakan publik. Dalam hal perubahan pasar buruh membesarnya kesenjangan pendapatan dari kepala

keluarga dan semakin besarnya andil pendapatan dari istri di dalam jumlah pendapatan keluarga merupakan dua faktor penyebab penting.

3.2. Faktor-faktor Penyebab Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Adelman dan Morris (1973) dalam Arsyad (2004) mengemukakan 8 faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara berkembang, yaitu: (a) Pertambahan penduduk yang tinggi yang menyebabkan menurunnya pendapatan perkapita; (b) Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang; (c) Ketidakmerataan pembangunan antar daerah; (d) Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*), sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah; (e) Rendahnya mobilitas sosial; (f) Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis; (g) Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara maju terhadap barang ekspor negara-negara sedang berkembang; (h) Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

Procovitch pernah menyampaikan beberapa dugaannya tentang sebab-sebab terjadinya kepincangan pembagian pendapatan yakni pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, perkembangan kota desa, dan sistem pemerintahan yang bersifat plutokratis.

Beberapa aspek yang telah diduga oleh Procovits pada tahun 1955 dikembangkan oleh Kuznets, yang sampai dewasa ini masih dikenal dengan hipotesa Kuznets, yang menimbulkan kontroversi di kalangan peneliti distribusi pendapatan di berbagai negara. Hipotesa ini menyatakan bahwa hubungan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kepincangan pembagian pendapatan pada tahap ini menjadi negatif. Jadi, tahap pertama pembangunan ekonomi akan mengalami tingkat kepincangan pembagian pendapatan yang semakin memburuk, stabil dan akhirnya menurun. Pola perkembangan ini menurut Kuznets tidak terlepas dari kondisi sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Penyebabnya adalah terjadinya konsentrasi kekayaan pada kelompok atas, kurang efektifnya pajak yang progresif, dan terjadinya akumulasi pemilikan modal.

Chiswick menyatakan bahwa dengan meningkatnya pembangunan ekonomi, kesenjangan pembagian penghasilan masyarakat juga meningkat, karena semakin cepat ekonomi berkembang, maka orang mengharapkan hasil yang semakin tinggi dari pendidikannya ; sementara, kesempatan pendidikan sangat terbatas. Tingkat partisipasi penduduk dalam lapangan pekerjaan berkaitan dengan jumlah penduduk muda yang sedang sekolah atau sedang bekerja. Pekerja-pekerja muda yang tingkat pendidikan dan keterampilannya relatif rendah akan memperoleh upah yang rendah pula, dan hal ini akan membuat pembagian pendapatan semakin senjang. Sebaliknya, jika penduduk muda ini masih tetap menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, berakibat berkurangnya kelompok penduduk yang

berpendapatan rendah sehingga akibat selanjutnya adalah tingkat kesenjangan distribusi pendapatan pun akan menurun.

Mengingat demikian luasnya ruang lingkup yang mencakup berbagai kemungkinan faktor penyebab ketidakmerataan pembagian pendapatan. Esmara Hendra (1976) mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembagian pendapatan tidak seluruhnya dapat dinyatakan secara kuantitatif, tetapi faktor-faktor kualitatif yang terdapat di dalamnya juga sangat penting. Keseluruhan faktor tersebut biasanya dapat dikategorikan menjadi dua bagian besar, yaitu : (1) aspek ekonomi makro, yang mencakup struktur perekonomian suatu negara. Kerangka ini biasanya memperhatikan aspek-aspek pertanian dan non pertanian kota dan pedesaan, tingkat pembangunan daerah, kesempatan kerja, dan kekayaan. (2) Aspek ekonomi mikro yang mencoba menjelaskan ketimpangan pembagian pendapatan dengan memperhatikan kapasitas masing-masing individu. Berbagai faktor yang mempengaruhi kapasitas tersebut seperti umur, pendidikan, lamanya hari kerja, jabatan, dan sebagainya.

Sigit Hananto (1980) menambahkan bahwa perubahan pembagian pendapatan juga disebabkan karena adanya perbedaan status tenaga kerja, seperti ada pengusaha, buruh, pegawai, pekerja sendiri, dan ada pula pekerja keluarga. Perbedaan status tenaga kerja inilah yang mengakibatkan pergeseran pembagian pendapatan dalam suatu sektor ekonomi. Perbedaan antar sektor sebenarnya dapat diterima, karena mau tak mau pasti terjadi perbedaan pertumbuhan produk antar sektor, sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ditekankan agar perbedaan antar status tenaga kerja dalam suatu sektor dijaga jangan sampai semakin melebar.

3.3. Ukuran Distribusi Pendapatan

Para ekonom pada umumnya membedakan dua ukuran pokok distribusi pendapatan yang digunakan untuk berbagai kajian kuantitatif dan analisis kualitatif. Ukuran tersebut adalah : (1) Ukuran Distribusi, yakni besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang atau rumahtangga, dan (2) Distribusi Fungsional atau distribusi kepemilikan faktor produksi (Todaro, 2000).

a. Koefisien Gini/ *Gini Ratio*

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah *Gini Ratio*. Nilai *gini ratio* berkisar antara nol dan satu. Bila *gini ratio* sama dengan nol berarti distribusi pendapatan amat merata sekali karena setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Namun bila *gini ratio* sama dengan satu menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna karena seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu orang saja. Singkatnya, semakin tinggi nilai *gini ratio* maka semakin timpang distribusi pendapatan suatu daerah. Sebaliknya, semakin rendah nilai *gini ratio* berarti semakin merata distribusinya. Pada prakteknya nilai *Gini Ratio* berkisar 0,50 – 0,70 dikategorikan ketimpangan tajam, sedangkan nilai *Gini Ratio* berkisar 0,20 – 0,35 ketimpangan relatif baik (merata).

Gini Ratio dapat digambarkan dengan suatu kurva yang disebut dengan Kurva *Lorentz*. Kurva ini memberi gambaran tentang bagaimana pendistribusian pendapatan penduduk suatu wilayah atau daerah pada suatu waktu. Kurva *Lorentz* didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan hubungan antara persentase kumulatif banyaknya

rumah tangga/penduduk dengan persentase kumulatif pendapatan yang diterima oleh rumah tangga/penduduk daerah tersebut, apabila unit pendapatan ditata menurut urutan menaik.

Rumus untuk menghitung *gini ratio* adalah sebagai berikut:

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i | Q_i + Q_{i-1} |}{10.000}$$

dimana :

G = *Gini ratio*

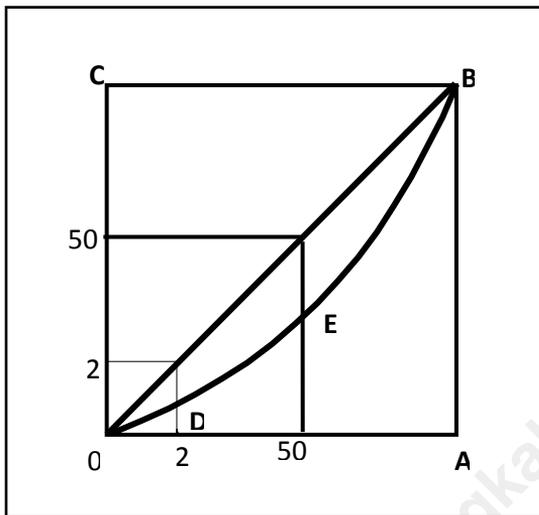
P_i = Persentase rumah tangga/penduduk pada kelompok pendapatan ke-(i)

Q_i = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelompok ke-(i)

Q_{i-1} = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelompok ke-(i-1)

K = Banyaknya kelompok pendapatan.

Gambar 1.
Kurva Lorentz



OC = Persentase kumulatif pendapatan

OA = Persentase kumulatif penduduk

OB = Diagonal Gini

D = menunjukkan bahwa 20 persen penduduk menikmati sekitar 8 persen pendapatan. Idealnya adalah 20 persen, demikian pula E identik dengan

D. Makin jauh garis ODEB dari diagonal OB makin senjang tingkat pendapatan.

b. Kriteria Bank Dunia

Bank Dunia mengelompokkan penduduk menurut kelompok pendapatan menjadi tiga kelompok pendapatan yaitu: pertama; 40 persen penduduk berpendapatan rendah, kedua; 40 persen penduduk berpendapatan menengah, ketiga; 20 persen penduduk berpendapatan tinggi.

Untuk melihat pemerataan pendapatan, Bank Dunia memfokuskan perhatiannya pada perkembangan pendapatan 40 persen penduduk berpendapatan terendah saja. Pemerataan diukur

berdasarkan persentase pendapatan yang diterima 40 persen penduduk berpendapatan rendah.

- a. Apabila 40 persen penduduk dalam kelompok berpendapatan terendah ini menerima kurang dari 12 persen jumlah pendapatan, maka dikatakan pemerataan rendah atau ketimpangan distribusi pendapatan tinggi.
- b. Apabila 40 persen penduduk dalam kelompok berpendapatan terendah ini menerima antara 12 persen sampai 17 persen jumlah pendapatan, maka dikatakan pemerataan sedang atau ketimpangan distribusi pendapatan sedang.
- c. Apabila 40 persen penduduk dalam kelompok berpendapatan terendah ini menerima lebih dari 17 persen jumlah pendapatan, maka dikatakan pemerataan tinggi atau ketimpangan distribusi pendapatan rendah.

3.4. Ketenagakerjaan

Keadaan di negara-negara berkembang dalam beberapa dasawarsa menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang terjadi tidak sanggup menyediakan kesempatan kerja yang lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk. Kesenjangan inilah yang mengakibatkan timbulnya berbagai masalah ketenagakerjaan dan pengangguran. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor semakin sedikitnya lapangan pekerjaan, tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya perlindungan hukum, upah yang kurang layak, faktor eksternal (contoh: krisis global), serta rendahnya kreativitas dan inovasi.

Masalah ketenagakerjaan di negara berkembang ternyata mempunyai dampak dan implikasi yang jauh lebih kompleks dibandingkan di negara-negara maju diantaranya kian beragamnya tindakan kriminal, makin banyaknya jumlah anak jalanan, pengemis, pengamen, perdagangan anak dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan turunnya kualitas sumber daya manusia, tidak dihargainya martabat dan harga diri manusia yang merupakan korban sosial dari penyakit sosial. Karena itu diperlukan upaya yang komprehensif dengan berbagai pendekatan dalam mengatasi masalah ketenakerjaan ini.

Kondisi ketenagakerjaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki karakteristik yang unik diantaranya adanya pengangguran di kalangan orang-orang berpendidikan. Hal ini terjadi karena bagi mereka yang tidak berpendidikan rela melakukan pekerjaan apa pun demi mendapatkan sesuap nasi. Sebaliknya mereka yang berpendidikan hanya bersedia bekerja jika pekerjaan tersebut dapat menghasilkan uang, status atau kepuasan yang relatif tinggi. Hal inilah yang mengakibatkan semakin tinggi pendidikan semakin besar peluangnya untuk menganggur.

Di sisi lain ketidakmampuan para pengusaha (karena skala bisnisnya sangat terbatas) mendorong mereka menjadi pekerja mandiri (menciptakan lapangan kerjanya sendiri). Pekerja mandiri di negara-negara berkembang biasanya merupakan pedagang asongan, pemilik warung kecil, tukang semir sepatu, pengamen, penarik becak maupun perajin kaki lima yang semata-mata hanya berusaha mempertahankan kelangsungan hidupnya sehingga dalam melakukan pekerjaannya tidak optimal. Mereka inilah yang digolongkan sebagai setengah pengangguran. Berbeda dengan di negara-negara maju dimana pekerja

mandiri umumnya merupakan pemilik perusahaan kecil, mitra dalam sebuah firma maupun tenaga profesional seperti pengacara, dokter, akuntan dan sebagainya.

Meningkatnya partisipasi wanita dalam dunia kerja juga menimbulkan masalah sendiri, karena kebanyakan dari mereka hanya bekerja di tempat yang tidak banyak menghasilkan pendapatan bahkan tidak dibayar sama sekali karena hanya terpusat di sektor pertanian maupun kegiatan informal lainnya. Kaum wanita hampir selalu mengalami diskriminasi dalam hal perolehan imbalan, peningkatan kelas pekerjaan maupun keamanan kerja. Selain itu proporsi wanita yang menganggur juga lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki.

Tingginya tingkat pengangguran di usia muda terutama di kalangan wanita juga menimbulkan masalah tersendiri. Lebih dari 30 persen pengangguran merupakan pemuda. Hal ini umumnya terjadi di daerah-daerah perkotaan. Banyak diantaranya yang merupakan migran dari perdesaan yang mengharapkan mendapat pekerjaan yang layak di kota. Pesatnya laju pertumbuhan penduduk di negara berkembang menyebabkan proporsi pemuda terhadap total penduduk menjadi besar yang tentunya menambah tekanan terhadap penyediaan lapangan pekerjaan.

BAB IV POLA KONSUMSI

4.1. Rata-rata Pengeluaran Perkapita

Tingkat pendapatan perkapita merupakan ukuran yang sering digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka penduduk dikatakan semakin sejahtera. Tetapi karena data pengeluaran lebih teliti dibandingkan data pendapatan dan dianggap cukup representatif menggambarkan tingkat pendapatan penduduk maka data pengeluaran digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk.

Pengeluaran/konsumsi rumah tangga sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga sebulan untuk konsumsi rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran makanan dan non makanan. Pengeluaran untuk makanan meliputi pengeluaran untuk konsumsi padi-padian, umbi-umbian, ikan/udang/cumi/kerang, daging, telur dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, bahan minuman, bumbu-bumbuan, konsumsi lainnya, makanan dan minuman jadi serta tembakau dan sirih. Pengeluaran non makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, pakaian, alas kaki dan tutup kepala, barang tahan lama, pajak, pungutan dan asuransi serta keperluan pesta dan upacara/kenduri.

Pengeluaran untuk makanan dihitung menggunakan pendekatan *consumption approach* artinya yang dihitung sebagai pengeluaran adalah yang sudah benar-benar dikonsumsi selama masa

referensi (seminggu yang lalu). Sedangkan pengeluaran untuk non makanan dihitung menggunakan *delivery approach* artinya yang dihitung sebagai konsumsi/pengeluaran adalah barang-barang yang sudah dibeli (meskipun belum lunas)/diperoleh/digunakan oleh anggota rumah tangga selama masa referensi (sebulan yang lalu dan setahun yang lalu).

Selama lima tahun terakhir, rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Badung terus menunjukkan kecenderungan peningkatan baik untuk wilayah perkotaan maupun perdesaan. Pada tahun 2006, rata-rata pengeluaran perkapita sebesar Rp. 426,9 ribu/kapita/bulan. Dan pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 810,4 ribu/kapita/bulan. Namun perlu diingat bahwa kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita ini tidak dapat menggambarkan daya beli riil penduduk pada tahun yang bersangkutan karena nilai nominal tersebut merupakan harga berlaku sehingga masih dipengaruhi oleh inflasi dan perbedaan harga barang antar wilayah.

Tabel 1. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Penduduk Kab.Badung (000 Rp) Menurut Klasifikasi Daerah, Tahun 2006 – 2010

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
2006	479,5	332,4	426,9
2007	470,8	396,7	444,4
2008	721,3	480,4	654,9
2009	758,7	570,1	706,7
2010	860,9	585,8	810,4

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

Rata-rata pengeluaran perkapita penduduk yang tinggal di daerah perkotaan biasanya lebih tinggi dari penduduk yang tinggal di daerah perdesaan. Hal ini diduga terjadi karena adanya perbedaan harga komoditi dan pola konsumsi penduduk di kedua wilayah tersebut. Trend selama lima tahun terakhir menunjukkan kesenjangan yang semakin meningkat antara rata-rata pengeluaran penduduk di perdesaan dan perkotaan.

4.2. Pola Konsumsi

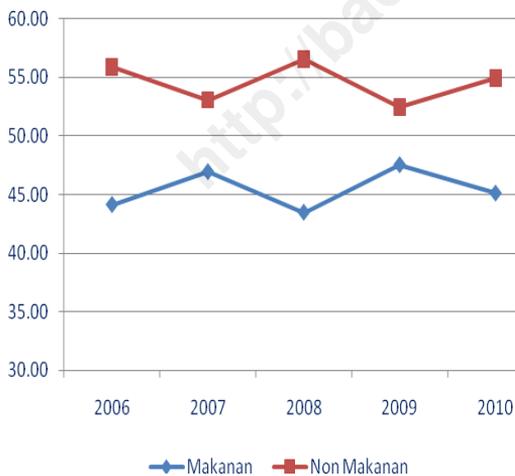
Dalam ilmu ekonomi, pengertian konsumsi lebih luas dari pada pengertian konsumsi dalam percakapan sehari-hari. Dalam percakapan sehari-hari konsumsi hanya dimaksudkan sebagai hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Dalam ilmu ekonomi, semua barang dan jasa yang digunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya disebut pengeluaran konsumsi. Dikonsumsi artinya digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan.

Manusia sebagai makhluk individu dan sosial mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas, baik dalam jumlah maupun jenisnya. Untuk memperoleh berbagai kebutuhan tersebut seseorang memerlukan pengeluaran untuk konsumsi. Dari semua pengeluaran yang dilakukan tersebut sekurang-kurangnya dapat memenuhi tingkat kebutuhan minimum yang diperlukan.

Perilaku konsumsi masyarakat dapat dilihat dari pola pengeluaran rumahtangga. Pengelompokan pengeluaran menjadi pengeluaran makanan dan pengeluaran non makanan digunakan untuk melihat kecenderungan konsumsi rumah tangga dari waktu ke waktu. Kecenderungan tersebut biasanya dipengaruhi oleh tingkat

pendapatan, selera dan lingkungan. Dalam kondisi pendapatan terbatas, kita akan mendahulukan pemenuhan kebutuhan makanan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan. Ernest Engel mengemukakan bahwa semakin tinggi pengeluaran rumahtangga dapat mengindikasikan semakin sejahtera masyarakatnya. Demikian juga halnya, semakin sejahtera suatu masyarakat cenderung memiliki pengeluaran non makanan lebih besar dari konsumsi makanan.

Gambar 2.
Pola Konsumsi Penduduk Kab. Badung menurut
Jenis Pengeluaran, 2006 - 2010



Pergeseran konsumsi atau pola pengeluaran tersebut terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sementara elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini semakin jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsinya

sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan (kalau bukan disimpan/ditabung atau diinvestasikan kembali).

Selama lima tahun terakhir secara umum pola konsumsi penduduk Kabupaten Badung relatif tidak banyak mengalami perubahan. Proporsi pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi makanan senantiasa lebih rendah dibandingkan dengan pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi non makanan. Berdasarkan Hukum Engel yang dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk Kabupaten Badung dapat dikatakan relatif sejahtera karena proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan lebih rendah dibandingkan dengan pengeluaran untuk non makanan.

Implikasi Hukum Engel dapat terlihat jelas pada tabel berikut yang menggambarkan proporsi pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi makanan dan non makanan pada masing-masing kelompok pengeluaran. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada kelas pengeluaran terendah, proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan adalah tertinggi. Proporsi ini semakin menurun seiring dengan peningkatan total pengeluaran yang merupakan *proxy* dari pendapatan.

Tabel 2. Proporsi Pengeluaran Penduduk Kabupaten Badung Menurut Kelompok dan Jenis Pengeluaran, 2010

Kelompok pengeluaran perkapita	Persentase pengeluaran makanan perkapita per bulan	Persentase pengeluaran non makanan perkapita per bulan	Persentase pengeluaran perkapita per bulan
200 000 - 299 999	52.45	47.55	100.00
300 000 - 499 999	52.39	47.61	100.00
500 000 - 749 999	49.49	50.51	100.00
750 000 - 999 999	45.11	54.89	100.00
>= 1 000 000	40.55	59.45	100.00
Total	45.11	54.89	100.00

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara pola konsumsi di daerah perkotaan dengan daerah perdesaan. Hasil Susenas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun pengeluaran penduduk yang tinggal di daerah perdesaan cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Tabel 3. Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Badung Menurut Jenis Pengeluaran dan Klasifikasi Daerah, Tahun 2006 – 2010

Tahun/ Klasifikasi Daerah	Pengeluaran makanan perkapita		Pengeluaran non makanan perkapita		Pengeluaran perkapita (000 Rp)	
	(000 Rp)	%	(000 Rp)	%		
2006	K	209.7	43.74	269.8	56.26	479.5
	D	150.1	45.14	182.4	54.86	332.4
	K+D	188.4	44.13	238.5	55.87	426.9
2007	K	220.2	46.76	250.6	53.24	470.8
	D	187.9	47.37	208.8	52.63	396.7
	K+D	208.7	46.96	235.7	53.04	444.4
2008	K	310.8	43.09	410.5	56.91	721.3
	D	215.7	44.90	264.7	55.10	480.4
	K+D	284.6	43.45	370.3	56.55	654.9
2009	K	356.9	47.03	401.9	52.97	758.7
	D	281.4	49.36	288.7	50.64	570.1
	K+D	336.1	47.55	370.7	52.45	706.7
2010	K	388.9	45.17	472.0	54.83	860.9
	D	261.9	44.70	323.9	55.30	585.8
	K+D	365.6	45.11	444.9	54.89	810.4

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

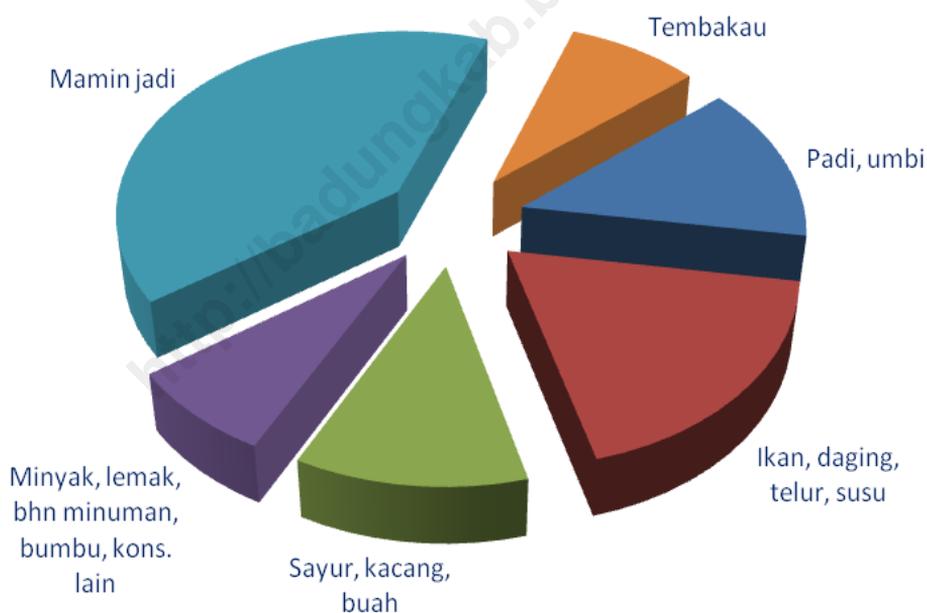
Konsumsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dan perdesaan menunjukkan pola yang serupa dimana bagian terbesar pengeluaran digunakan untuk konsumsi non makanan. Namun demikian kesenjangan antara pengeluaran makanan dan non makanan lebih tinggi di daerah perkotaan. Sedangkan di daerah perdesaan relatif seimbang meski masih lebih besar konsumsi non makanan.

a. Pola Konsumsi Makanan

Dalam kajian ini komoditi makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat dibagi menjadi 14 jenis, yaitu padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, bahan minuman, bumbu-bumbuan, konsumsi lainnya, makanan dan minuman jadi serta tembakau dan sirih. Konsumsi makanan jadi merupakan porsi terbesar konsumsi komoditi makanan masyarakat Kabupaten Badung. Berdasarkan hasil Susenas 2010 tercatat konsumsi makanan jadi rata-rata sebesar Rp. 147 ribu perkapita per bulan atau sekitar 40,22 persen dari total pengeluaran untuk makanan. Porsi berikutnya adalah konsumsi beras dan padi-padian lainnya yang mencapai rata-rata Rp. 48,8 ribu perkapita per bulan atau sekitar 13,34 persen dari total pengeluaran konsumsi komoditi makanan. Namun sayangnya tingginya tingkat pendapatan penduduk belum dibarengi dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya konsumsi sumber-sumber protein seperti ikan, daging serta telur dan susu. Pada tahun 2010 konsumsi komoditi ini rata-rata mencapai Rp.67,4 ribu perkapita per bulan atau hanya sekitar 18,43 persen dari total konsumsi makanan, jauh di bawah konsumsi makanan dan minuman jadi. Di sisi lain masih tingginya konsumsi tembakau dan

rokok yang rata-rata mencapai Rp. 31 ribu perkapita per bulan atau sekitar 8,48 persen dari total pengeluaran konsumsi makanan rasanya masih perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah khususnya yang membidangi kesehatan. Kenyataan ini merupakan salah satu indikator masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.

Gambar 3. Proporsi Pengeluaran Penduduk Kabupaten Badung Menurut Jenis Komoditi Untuk Kelompok Makanan, Tahun 2010



Secara umum tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pola konsumsi makanan antara penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan dengan perdesaan. Porsi terbesar pengeluaran makanan digunakan untuk konsumsi makanan dan minuman jadi. Meskipun demikian konsumsi makanan dan minuman jadi untuk perkotaan yang mencapai 41,41 persen lebih tinggi jika dibandingkan penduduk perdesaan yang hanya 32,36 persen. Demikian pula halnya dengan konsumsi sumber protein yang mencapai 18,78 persen di perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan yang hanya 16,18 persen. Sebaliknya tingkat konsumsi beras di daerah perdesaan yang mencapai 19,35 persen lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan yang hanya sebesar 12,72 persen. Pola serupa juga terjadi untuk konsumsi komoditi sayuran, buah-buahan, minyak dan lemak serta bumbu-bumbuan yang lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan. Terbatasnya akses informasi terutama yang berkaitan dengan kesehatan di daerah perdesaan kemungkinan besar juga berdampak pada perilaku kehidupan sehari-hari penduduknya. Salah satunya dapat dilihat dari tingginya konsumsi tembakau dan sirih yang mencapai 9,40 persen di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan yang hanya sebesar 8,34 persen. Ilustrasi selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Proporsi Pengeluaran Penduduk Kabupaten Badung Untuk Kelompok Makanan Menurut Jenis Komoditi dan Klasifikasi Daerah, Tahun 2010

Jenis Komoditi	K	D	K+D
Padi-padian	12.48	19.02	13.34
Umbi-umbian	0.24	0.33	0.25
Ikan	5.55	4.66	5.43
Daging	5.41	5.97	5.48
Telur dan susu	7.82	5.55	7.52
Sayuran	6.27	7.57	6.44
Kacang-kacangan	2.33	2.77	2.38
Buah-buahan	2.86	2.04	2.75
Minyak dan lemak	2.11	3.34	2.27
Bahan minuman	2.19	3.46	2.35
Bumbu-bumbuan	1.00	1.31	1.04
Konsumsi lainnya	2.00	2.23	2.03
Makanan dan minuman jadi	41.41	32.36	40.22
Tembakau dan sirih	8.34	9.40	8.48

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

Selama lima tahun terakhir pola konsumsi makanan penduduk Kabupaten Badung relatif tidak banyak mengalami perubahan. Namun demikian ada kecenderungan terjadi penurunan proporsi pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi beras. Demikian pula halnya dengan konsumsi komoditi ikan dan daging baik segar maupun olahan. Sebaliknya pengeluaran untuk konsumsi makanan dan minuman jadi terus mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini. Sementara itu proporsi pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi komoditi telur dan susu, sayuran serta tembakau dan sirih cenderung stabil. Fenomena ini mengisyaratkan telah terjadi pergeseran gaya hidup penduduk selama lima tahun terakhir.

Masyarakat saat ini lebih suka bersikap praktis terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman. Menjamurnya berbagai restoran maupun kedai makanan dan minuman siap saji turut berperan serta membentuk sikap tersebut. Di satu sisi hal ini akan memberikan kontribusi dalam kegiatan ekonomi namun dari sisi kesehatan tampaknya kenyataan ini perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi yang seimbang dan menyehatkan.

Tabel 5. Proporsi Pengeluaran Penduduk Kabupaten Badung Untuk Kelompok Makanan Menurut Jenis Komoditi, 2006 -2010

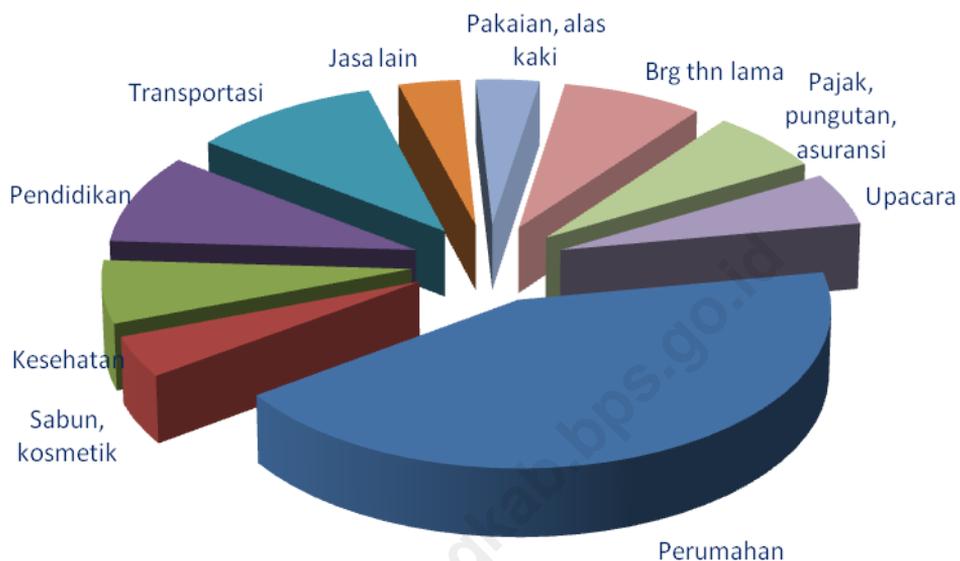
Jenis Komoditi	2006	2007	2008	2009	2010
Padi-padian	22.14	19.62	15.19	14.20	13.34
Umbi-umbian	0.72	0.44	0.44	0.49	0.25
Ikan	6.25	5.24	5.48	5.92	5.43
Daging	7.48	7.33	6.07	6.69	5.48
Telur dan susu	7.45	7.13	6.93	7.22	7.52
Sayuran	6.58	6.34	6.46	6.29	6.44
Kacang-kacangan	4.02	3.00	2.39	2.83	2.38
Buah-buahan	2.93	4.56	3.32	3.39	2.75
Minyak, lemak	3.48	3.41	3.00	2.98	2.27
Bahan Minuman	4.75	3.82	2.99	2.88	2.35
Bumbu-bumbuan	1.81	1.65	1.47	1.60	1.04
Konsumsi lainnya	3.63	2.61	2.35	2.52	2.03
Makanan, minuman jadi	18.80	26.17	35.80	34.59	40.22
Tembakau, sirih	9.95	8.69	8.11	8.39	8.48

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

b. Pola Konsumsi Non Makanan

Pengeluaran konsumsi non makanan dapat diklasifikasikan menjadi 10 jenis yaitu pengeluaran untuk keperluan perumahan, sabun dan kosmetik, kesehatan, pendidikan, transportasi, jasa-jasa, pakaian dan alas kaki, barang tahan lama, pajak dan asuransi serta biaya upacara adat dan agama. Pada tahun 2010 pengeluaran untuk konsumsi perumahan dan fasilitas rumah yang rata-rata mencapai Rp. 191,07 ribu perkapita per bulan atau sekitar 42,95 persen dari total pengeluaran non makanan, mendominasi pengeluaran konsumsi non makanan. Kemudian disusul pengeluaran untuk keperluan transportasi yang rata-rata mencapai Rp. 46,68 ribu perkapita per bulan atau sekitar 10,49 persen. Gencarnya program-program pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan belum signifikan mengerek alokasi pengeluaran penduduk untuk keperluan pendidikan yang hanya sekitar 9,29 persen atau rata-rata Rp. 41,31 ribu perkapita per bulan. Sikap konsumtif masyarakat tercermin dari relatif tingginya alokasi pengeluaran untuk konsumsi barang tahan lama yang mencapai 7,82 persen. Sementara itu untuk keperluan kesehatan hanya sebesar 6,49 persen, sedikit lebih besar dari alokasi untuk keperluan upacara adat dan agama yang mencapai 5,41 persen dari total pengeluaran konsumsi non makanan.

Gambar 4. Proporsi Pengeluaran Penduduk Kabupaten Badung Menurut Jenis Pengeluaran Untuk Kelompok Non Makanan, Tahun 2010



Seperti halnya konsumsi makanan, konsumsi non makanan juga menunjukkan pola yang serupa antara penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan dengan perdesaan yang masih didominasi pengeluaran untuk keperluan perumahan, fasilitas rumah tangga dan transportasi. Meskipun demikian persentase pengeluaran perumahan di perkotaan yang mencapai 43,75 persen masih lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan yang hanya 37,78 persen. Di sisi lain persentase pengeluaran untuk transportasi di perdesaan yang mencapai 13,15 persen justru lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan yang hanya 10,08 persen. Demikian pula halnya dengan konsumsi untuk keperluan upacara yang mencapai 8,07 persen di daerah perdesaan sementara di perkotaan hanya 5,00 persen.

Tabel 6. Proporsi Pengeluaran Penduduk Kabupaten Badung Untuk Kelompok Non Makanan Menurut Jenis Komoditi dan Klasifikasi Daerah, 2010

Jenis Komoditi	K	D	K+D
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	43.75	37.78	42.95
Sabun dan kosmetik	4.33	3.70	4.25
Kesehatan	6.48	6.57	6.49
Pendidikan	9.28	9.30	9.29
Transportasi	10.08	13.15	10.49
Jasa	3.36	3.82	3.42
Pakaian dan alas kaki	3.55	3.35	3.53
Barang tahan lama	7.98	6.81	7.82
Pajak dan asuransi	6.19	7.44	6.36
Biaya upacara	5.00	8.07	5.41

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

Secara umum dalam lima tahun terakhir tidak ada perubahan yang signifikan dalam pola konsumsi non makanan. Meski demikian ada kecenderungan penurunan proporsi pengeluaran untuk keperluan perumahan yang mencapai 49,22 persen pada tahun 2006 menjadi 42,95 persen pada tahun 2010. Perlahan namun pasti, kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesehatan di masyarakat juga semakin meningkat. Dapat dilihat dari proporsi pengeluaran untuk biaya kesehatan yang merambat naik dari 3,87 persen pada tahun 2006 menjadi 6,49 persen pada tahun 2010. Hal serupa juga terjadi untuk biaya pendidikan yang mengalami peningkatan dari 7,66 persen pada tahun 2006 menjadi 9,29 persen pada tahun 2010. Perbaikan kondisi ekonomi ternyata menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah meningkatnya sifat konsumtif masyarakat yang dapat dilihat dari kecenderungan peningkatan konsumsi barang-barang tahan lama dari

3,48 persen pada tahun 2006 menjadi 7,82 persen pada tahun 2010. Di sisi lain terjadi peningkatan proporsi pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran pajak, retribusi dan asuransi dari 4,28 persen pada tahun 2006 menjadi 6,36 persen pada tahun 2010.

Tabel 7. Proporsi Pengeluaran Penduduk Kabupaten Badung Untuk Kelompok Non Makanan Menurut Jenis Komoditi, Tahun 2006 dan 2010

Jenis Komoditi	2006	2010
Perumahan	49.22	42.95
Sabun, kosmetik	3.85	4.25
Kesehatan	3.87	6.49
Pendidikan	7.66	9.29
Transportasi	12.79	10.49
Jasa lain	1.17	3.42
Pakaian, alas kaki	3.08	3.53
Brg thn lama	3.48	7.82
Pajak, pungutan, asuransi	4.28	6.36
Upacara	10.61	5.41

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

BAB V

DISTRIBUSI PENDAPATAN

Pada tahap awal pembangunan, banyak negara yang meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan target utama yang harus dikejar untuk mensejahterakan rakyatnya. Berdasarkan teori *trickle down effet* (efek menetes ke bawah), diharapkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mengerek tingkat pendapatan per kapita sehingga masalah-masalah seperti pengangguran dan kemiskinan yang pada akhirnya akan berdampak pada masalah kriminalitas akan teratasi.

Namun kenyataan ternyata berbicara lain. Pembangunan ekonomi mensyaratkan *Gross National Products* (GNP) yang tinggi, dan hal itu hanya bisa dicapai dengan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi. Memacu tingkat pertumbuhan ekonomi secara cepat dilakukan dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi padat modal yang notabene dikuasai oleh kaum elit kaya raya yang minoritas. Sehingga hasilnya pun kurang dapat dinikmati oleh mayoritas rakyat miskin. Hal ini akan memperparah ketimpangan pendapatan dan meningkatkan jumlah kemiskinan absolut. Sebaliknya jika yang digerakkan adalah sektor-sektor ekonomi padat karya yang notabene digeluti oleh mayoritas rakyat miskin maka target pertumbuhan ekonomi secara agregat akan sulit dicapai.

Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi memang merupakan syarat yang diperlukan (*necessary*) dalam mensejahterakan penduduk, tetapi belum merupakan syarat cukup (*sufficient*). Untuk itu diperlukan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dimana pertumbuhan ekonomi

akan berjalan seiring dengan menurunnya pengangguran, kemiskinan dan semakin meratanya distribusi pendapatan diantara penduduk.

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah *Gini Ratio*. Semakin tinggi nilai *gini ratio* maka semakin timpang distribusi pendapatan suatu daerah. Sebaliknya, semakin rendah nilai *gini ratio* berarti semakin merata distribusi pendapatannya.

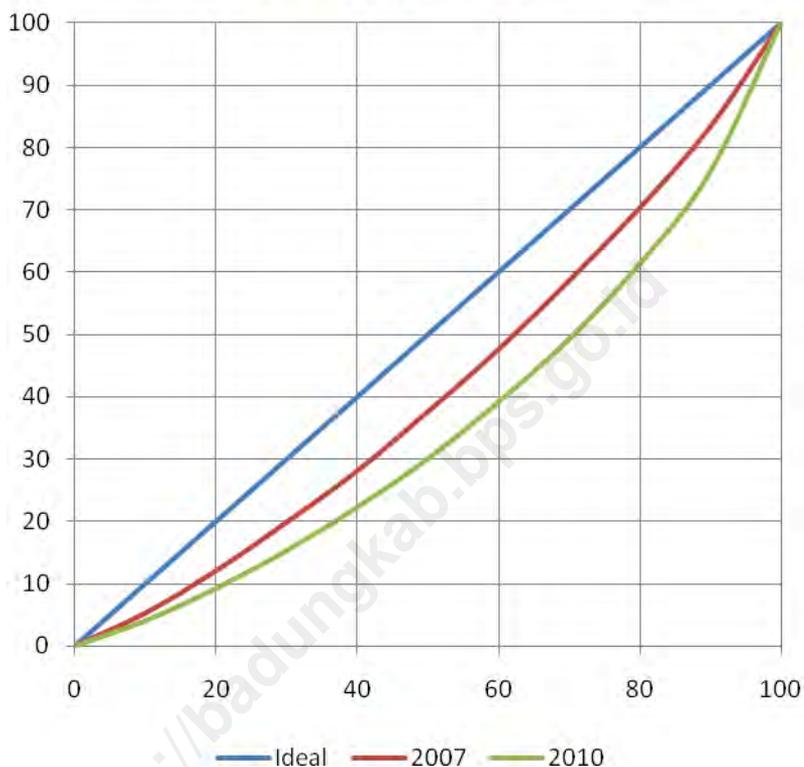
Tabel 8. Perkembangan Nilai *Gini Ratio* Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2010

Tahun	Nilai <i>Gini Ratio</i>
2006	0.2794
2007	0.1740
2008	0.2673
2009	0.2273
2010	0.2863

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, ketimpangan pendapatan di Kabupaten Badung dapat dikatakan rendah karena nilai *gini ratio* berada di bawah angka 0,300. Namun demikian perlu diupayakan langkah-langkah yang tepat dalam rangka meningkatkan pemerataan pendapatan di kalangan penduduk karena berdasarkan nilai *gini ratio* di atas, ketimpangan distribusi pendapatan masih relatif fluktuatif dari tahun ke tahun bahkan cenderung meningkat dalam kurun waktu setahun terakhir.

Gambar 5. Perkembangan Gini Ratio
Kab. Badung 2007, 2010



Selain *Gini Ratio*, indikator lainnya yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah kriteria Bank Dunia. Indikator ini memfokuskan perhatiannya pada perkembangan pendapatan 40 persen penduduk berpendapatan terendah saja.

Tabel 9. Distribusi Pendapatan Kabupaten Badung Berdasarkan Kriteria Bank Dunia, Tahun 2006 – 2010

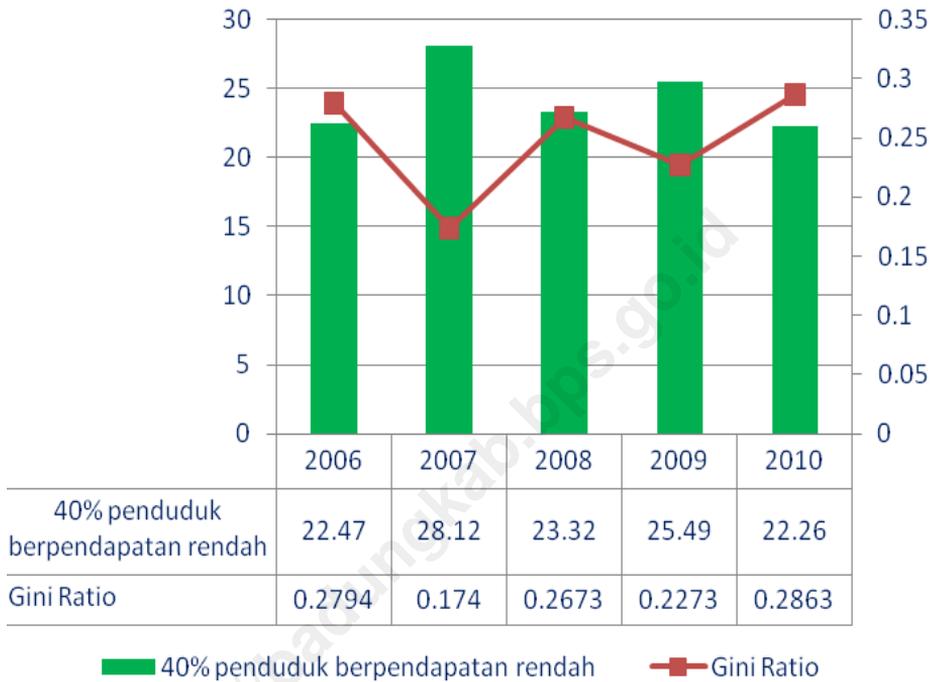
Kriteria Penduduk	2006	2007	2008	2009	2010
40% penduduk berpendapatan terendah	22.47	28.12	23.32	25.49	22.26
40% penduduk berpendapatan menengah	39.80	42.21	39.58	40.43	39.07
20% penduduk berpendapatan tertinggi	37.74	29.67	37.10	34.08	38.68

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

Berdasarkan teori, ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Badung pada tahun 2010 tergolong rendah, karena 40 persen penduduk berpenghasilan terendah menerima lebih dari 17 persen total pendapatan penduduk. Namun perlu diperhatikan bahwa selama setahun terakhir ketimpangan pendapatan justru meningkat yang ditandai dengan menurunnya proporsi pendapatan yang diterima 40 persen penduduk terendah dari 25,49 persen pada tahun 2009 menjadi hanya 22,26 persen pada tahun 2010.

Gambar berikut ini menunjukkan kesesuaian antara nilai indikator *gini ratio* dengan persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah. Semakin tinggi nilai *gini ratio* maka semakin rendah persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah. Hal ini mengindikasikan semakin tingginya tingkat ketimpangan. Sebaliknya, semakin rendah nilai *gini ratio* maka persentase pendapatan yang diterima 40 persen penduduk berpendapatan terendah akan semakin tinggi, yang mengindikasikan terjadinya penurunan tingkat ketimpangan.

Gambar 6.
Gini Ratio dan Distribusi Pendapatan Kab. Badung
Tahun 2006 - 2010



Secara umum tidak terdapat perbedaan yang relatif besar antara ketimpangan di daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Meskipun demikian selama tiga tahun terakhir ketimpangan di daerah perkotaan sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah pedesaan. Secara lebih jelas perbedaan ketimpangan pendapatan antara perkotaan dan pedesaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 10. Ketimpangan Pendapatan Antara Daerah Perkotaan dan Perdesaan Di Kabupaten Badung, Tahun 2006-2010

Indikator	Tahun	K	D	K+D
Gini Ratio	2006	0.2167	0.2772	0.2794
	2007	0.1709	0.1612	0.1740
	2008	0.2510	0.2500	0.2673
	2009	0.2198	0.2078	0.2273
	2010	0.2780	0.2580	0.2863
40% penduduk berpendapatan rendah	2006	24.11	23.00	22.47
	2007	28.70	29.53	28.12
	2008	24.15	24.56	23.32
	2009	26.16	26.69	25.49
	2010	22.41	24.54	22.26
40% penduduk berpendapatan menengah	2006	43.75	38.88	39.80
	2007	41.63	41.46	42.21
	2008	39.79	40.35	39.58
	2009	40.11	40.60	40.43
	2010	39.62	38.35	39.07
20% penduduk berpendapatan tinggi	2006	32.15	38.12	37.74
	2007	29.68	29.01	29.67
	2008	36.06	35.09	37.10
	2009	33.72	32.71	34.08
	2010	37.97	37.11	38.68

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

BAB VI KETENAGAKERJAAN

6.1. Gambaran Umum Ketenagakerjaan

Kegiatan ekonomi angkatan kerja menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan baik lingkup nasional, provinsi, kabupaten ataupun kota. Pembangunan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dilihat dari aspek ekonomi ataupun sosial. Salah satu sasaran pembangunan adalah menciptakan kesempatan kerja sebanyak-banyaknya agar angkatan kerja dapat terserap dalam kegiatan ekonomi. Dengan perkataan lain proses pembangunan harus dapat menekan angka pengangguran. Terlibatnya angkatan kerja dalam berbagai kegiatan ekonomi berimplikasi luas terhadap aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Hal ini mudah dipahami, karena makin banyak angkatan kerja yang bekerja berimplikasi pada meningkatnya daya beli masyarakat yang kemudian mendorong perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan produksi atau membuka usaha baru sesuai kebutuhan masyarakat. Penambahan produksi dan atau penambahan usaha baru identik dengan perluasan kesempatan kerja.

Berdasarkan konsep yang digunakan oleh *International Labour Organization/ILO* (Organisasi Buruh Internasional), BPS membagi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) menurut kegiatan utamanya menjadi dua, yaitu angkatan kerja (*economically active*) dan bukan angkatan kerja (*non economically active*). Angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja dan menganggur, sedangkan bukan angkatan

kerja terdiri atas penduduk yang sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Dalam empat tahun terakhir tingkat partisipasi angkatan kerja masih berada di kisaran 75 persen dari total penduduk usia kerja. Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kecenderungan menurun yang cukup signifikan dari 4,58 persen pada tahun 2007 menjadi 1,25 persen pada tahun 2010. Hal ini berimbas pada meningkatnya persentase penduduk yang terserap di pasar kerja dari 95,42 persen pada tahun 2007 menjadi 98,75 persen pada tahun 2010. Namun sayangnya jumlah penduduk setengah menganggur (jam kerjanya dibawah 35 jam seminggu) masih tinggi yaitu sekitar 48,82 ribu orang dari total 310,15 ribu penduduk bekerja (15,74 persen). Penduduk setengah menganggur ini sebagian besar merupakan setengah menganggur sukarela yang tidak berupaya mencari pekerjaan lain meskipun masih memiliki banyak waktu luang. Dengan demikian total pengangguran yang meliputi pengangguran terbuka dan setengah menganggur terpaksa pada tahun 2010 sebanyak 20,75 ribu orang atau sekitar 6,61 persen dari total angkatan kerja, cenderung menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

**Tabel 11. Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Badung,
Tahun 2007 – 2010**

Indikator	2007	2008	2009	2010
Penduduk Usia Kerja (000 org)	304.38	310.22	317.06	409.76
Angkatan Kerja (000 org)	233.81	234.60	239.29	314.09
Bekerja (000 org)	223.11	227.09	231.63	310.15
Bekerja Penuh (>= 35 jam seminggu) (000 org)	178.04	173.77	189.38	261.32
Setengah Menganggur (< 35 jam seminggu) (000 org)	45.07	53.32	42.25	48.82
Setengah Menganggur Terpaksa (000 org)	9.55	20.61	15.84	16.81
Setengah Menganggur Sukarela (000 org)	35.52	32.71	26.41	32.02
Menganggur (000 org)	10.70	7.51	7.66	3.94
Bukan Angkatan Kerja (000 org)	70.57	75.62	77.77	95.67
Sekolah (000 org)	22.60	21.80	26.91	27.50
Mengurus Rumah Tangga (000 org)	42.10	44.60	44.70	54.04
Lainnya (000 org)	5.87	9.22	6.16	14.14
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76.81	75.62	73.06	75.69
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4.58	3.20	3.20	1.25
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	95.42	96.8	96.80	98.75
Total pengangguran (pengangguran terbuka + setengah menganggur terpaksa) (000 org)	20.25	28.12	23.50	20.75
Persentase total pengangguran terhadap angkatan kerja	8.66	11.99	9.82	6.61

Sumber: Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional

6.2. Profil Pekerja

Penduduk yang bekerja masih terpusat di kelompok umur 25 – 44 tahun, yaitu kelompok umur yang dianggap paling produktif. Persentase penduduk yang bekerja semakin berkurang seiring dengan penambahan usia tenaga kerja. Di sisi lain, persentase tenaga kerja pemula usia 15 – 19 tahun merupakan yang terkecil jika dibandingkan dengan kelompok umur lainnya.

Berbagai program pemerintah diupayakan berbasis gender, dimana baik perempuan dan laki-laki diberikan kesempatan yang sama baik dalam hal memperoleh pendidikan maupun berpartisipasi aktif di dunia kerja. Namun pada kenyataannya dunia kerja masih didominasi oleh tenaga kerja laki-laki. Rendahnya partisipasi perempuan di dunia kerja terjadi di setiap kelompok umur yang ditandai dengan lebih sedikitnya jumlah tenaga kerja perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Sebagai perbandingan, secara umum di setiap 100 orang tenaga kerja perempuan terdapat 127 orang tenaga kerja laki-laki. *Sex ratio* tenaga kerja paling tinggi terjadi pada kelompok umur 60 – 64 tahun yang mencapai angka 135. Artinya di setiap 100 orang tenaga kerja perempuan terdapat 135 tenaga kerja laki-laki. Sementara yang terendah terdapat di kelompok umur 15 – 19 tahun, yaitu sebesar 95.

kerja. Di tahun 2010 ini sektor industri berhasil menyerap 12,10 persen tenaga kerja.

Tabel 12. Jumlah Penduduk Kabupaten Badung Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja (000 orang) Menurut Lapangan Usaha Utama, Tahun 2007-2010

Sektor	2007		2008		2009		2010	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Primer	47.38	21.24	52.94	23.31	49.90	21.54	60.80	19.60
Sekunder	46.53	20.85	44.46	19.58	52.93	22.85	64.48	20.79
Tersier	129.20	57.91	129.69	57.11	128.80	55.60	184.87	59.61
Total	223.11	100.00	227.09	100.00	231.63	100.00	310.15	100.00

Sumber: Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional

Kualitas tenaga kerja salah satunya dapat diukur dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Sekitar 51,39 persen tenaga kerja di Kabupaten Badung berijazah SLTA dan perguruan tinggi. Sementara itu hanya 5,39 persen tenaga kerja yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Angka ini menunjukkan kecenderungan menurun jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin meningkat. Secara umum dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Badung merupakan tenaga kerja terdidik.

Tabel 13. Jumlah Penduduk Kabupaten Badung Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja (000 orang) Menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 2007-2010

Tingkat Pendidikan	2007		2008		2009		2010	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Tidak/blm sekolah	13.91	6.23	13.81	6.08	16.54	7.14	16.70	5.39
Tidak/blm tamat SD	14.67	6.57	13.33	5.87	24.09	10.40	30.05	9.69
SD dan sederajat	54.78	24.55	52.17	22.97	35.97	15.53	52.56	16.95
SLTP dan sederajat	33.80	15.15	32.14	14.15	36.29	15.67	51.44	16.58
SLTA dan sederajat	79.89	35.81	88.59	39.01	88.54	38.23	120.40	38.82
Perguruan tinggi	26.06	11.68	27.05	11.91	30.19	13.03	39.00	12.57
Jumlah	223.11	100.00	227.09	100.00	231.63	100.00	310.15	100.00

Sumber: Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional

Berdasarkan jumlah jam kerjanya dapat digambarkan karakteristik pekerja di suatu wilayah. Penduduk yang jam kerjanya lebih dari 35 jam dalam seminggu dikategorikan sebagai pekerja penuh. Sedangkan penduduk yang jumlah jam kerjanya 1 sampai 34 jam seminggu dikategorikan sebagai setengah pengangguran atau pekerja paruh waktu (*part time worker*). Penduduk yang bekerja tetapi jumlah jam kerjanya seminggu yang lalu hanya 0 jam dikategorikan sebagai sementara sedang tidak bekerja.

Hasil Sakernas menunjukkan bahwa 83,15 persen tenaga kerja merupakan pekerja penuh, cenderung meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 77,95 persen pada tahun 2007. Pola serupa juga terjadi pada kelompok setengah menganggur yang juga

cenderung menurun dari 20,20 persen pada tahun 2007 menjadi hanya 15,74 persen pada tahun 2010. Sedangkan sisanya 1,11 persen adalah orang-orang yang seminggu yang lalu sedang sementara tidak bekerja karena sakit, cuti, mogok kerja dan lain sebagainya.

Tabel 14. Jumlah Penduduk Kabupaten Badung Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja (000 orang) Menurut Jumlah Jam Kerja, Tahun 2007-2010

Jumlah Jam Kerja	2007		2008		2009		2010	
	N	%	N	%	N	%	N	%
0	4.13	1.85	3.90	1.72	2.73	1.18	3.45	1.11
1 - 34	45.07	20.20	53.32	23.48	42.25	18.24	48.82	15.74
35+	173.91	77.95	169.87	74.80	186.65	80.58	257.88	83.15
Jumlah	223.11	100.00	227.09	100.00	231.63	100.00	310.15	100.00

Sumber: Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional

Setelah menurun selama periode 2007 - 2009, di tahun 2010 ini jumlah tenaga kerja yang berstatus sebagai buruh justru meningkat menjadi 41,69 persen dari 37,06 persen pada tahun sebelumnya. Di sisi lain jumlah pengusaha baik yang berusaha sendiri maupun yang dibantu buruh mengalami penurunan dari 37,41 persen pada tahun 2009 menjadi 34,13 persen pada tahun 2010. Sementara itu persentase pekerja keluarga/pekerja tak dibayar justru menunjukkan kecenderungan meningkat selama empat tahun terakhir ini. Pada tahun 2010 terdapat 12,58 persen pekerja keluarga/pekerja tak dibayar sedangkan pada tahun sebelumnya hanya 11,56 persen.

Tabel 15. Jumlah Penduduk Kabupaten Badung Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja (000 orang) Menurut Status Dalam Pekerjaan Utama, Tahun 2007-2010

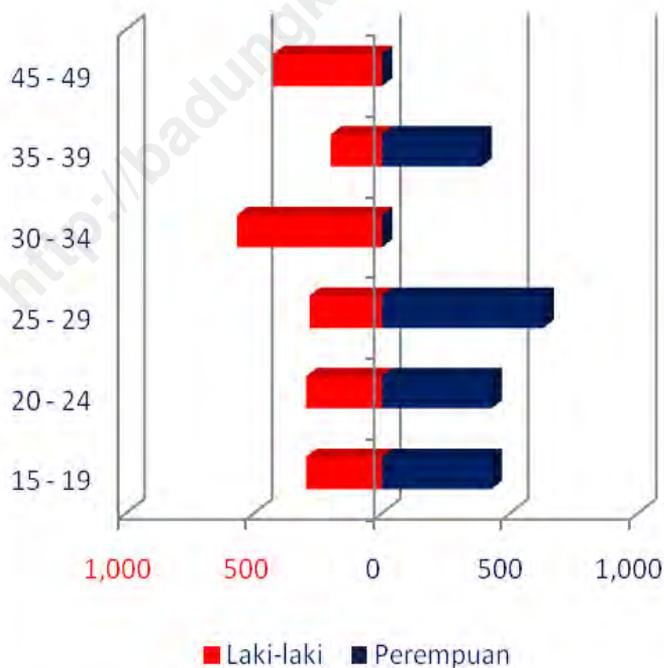
Status/ Kedudukan Dalam Pekerjaan Utama	2007		2008		2009		2010	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Berusaha sendiri	42.15	18.89	34.33	15.12	46.20	19.95	51.44	16.59
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	32.39	14.52	44.52	19.61	40.44	17.46	54.42	17.55
Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	10.02	4.49	7.04	3.10	10.74	4.63	11.91	3.84
Buruh/ karyawan/ pegawai	99.09	44.41	92.76	40.85	85.85	37.06	129.29	41.69
Pekerja bebas di pertanian	1.50	0.67	3.62	1.59	4.23	1.83	3.79	1.22
Pekerja bebas di non pertanian	14.70	6.59	19.42	8.55	17.40	7.51	20.28	6.54
Pekerja keluarga/tak dibayar	23.26	10.43	25.39	11.18	26.77	11.56	39.01	12.58
Jumlah	223.11	100.00	227.09	100.00	231.63	100.00	310.15	100.00

Sumber: Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional

6.3. Profil Pengangguran

Seperti halnya penduduk yang bekerja, pengangguran juga masih didominasi oleh kaum laki-laki yang mencapai 52,41 persen dari total pengangguran. Berdasarkan hasil Sakernas 2010 pengangguran terkonsentrasi di kelompok umur 25 – 29 tahun yang mencapai sekitar 23,20 persen dari total pengangguran. Fenomena serupa juga ditunjukkan oleh pengangguran berjenis kelamin perempuan. Sedangkan untuk jenis kelamin laki-laki, pengangguran terkonsentrasi di kelompok umur 30 – 34 tahun.

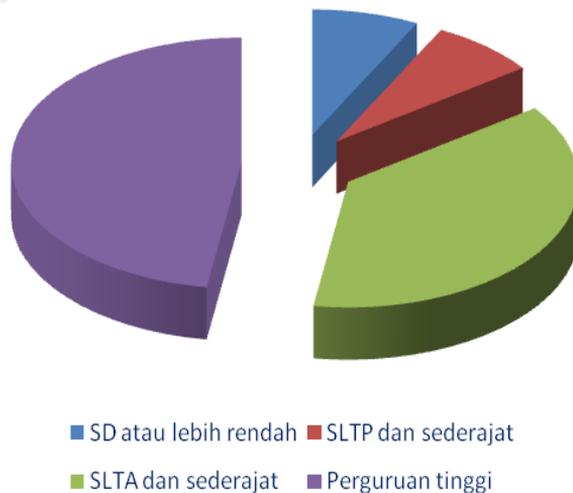
Gambar 8. Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, Tahun 2010



Dalam upaya mendukung pengarusutamaan gender yang salah satunya diwujudkan dengan memberikan kesempatan yang sama baik kepada laki-laki maupun perempuan untuk terlibat dan aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasilnya di segala bidang terutama di sektor pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja, pemerintah daerah hendaknya mengupayakan program-program untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pasar kerja. Upaya meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi tentunya secara tidak langsung juga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga.

Hasil Sakernas 2010 menunjukkan bahwa pengangguran di Kabupaten Badung merupakan pengangguran terdidik dimana sekitar 84,97 persen merupakan penduduk yang berijazah SLTA ke atas dan hanya 7,51 persen saja yang berijazah SD atau lebih rendah.

Gambar 9. Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 2010



Tingginya pengangguran terdidik yang terkonsentrasi di kelompok umur 25 -34 tahun menunjukkan bahwa lulusan perguruan tinggi secara umum belum terserap di pasar kerja. Hal ini memperkuat indikasi adanya *mismatch* antara kurikulum pendidikan yang dikembangkan terutama di tingkat perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja. Untuk mengatasinya diperlukan kerjasama yang intensif antara pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga pendidikan keahlian untuk mengembangkan kurikulum yang berbasis kebutuhan pasar kerja, menyalurkan lulusan-lulusan perguruan tinggi ke pasar kerja bahkan mendorong para lulusan perguruan tinggi tersebut untuk berusaha menciptakan lapangan kerja sendiri.

6.4. Profil Setengah Menganggur

a. Setengah Menganggur Terpaksa

Setengah menganggur terpaksa merupakan pekerja yang bekerja dibawah jam kerja normal (35 jam seminggu) dan masih berusaha mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha/masih mau menerima pekerjaan lain, dalam upayanya meningkatkan penghasilan. Berdasarkan hasil Sakernas 2010, tercatat 15,74 persen pekerja merupakan setengah pengangguran (sekitar 16,81 ribu orang). Dari sejumlah itu 34,42 persen diantaranya merupakan setengah menganggur terpaksa.

Berbanding terbalik dengan karakteristik pekerja dan pengangguran, setengah penganggur terpaksa lebih didominasi oleh kaum perempuan yang mencapai 57,46 persen. Setengah menganggur terpaksa ini terkonsentrasi pada kelompok umur 25 – 44 tahun,

kelompok umur yang seharusnya merupakan kelompok paling produktif untuk bekerja. Ditinjau dari sisi tingkat pendidikan, setengah penganggur terpaksa merupakan tenaga kerja terdidik, dimana sekitar 50,20 persen berijazah SLTA ke atas dan hanya 10,32 persen saja yang sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan formal.

Bagian terbesar dari setengah menganggur terpaksa merupakan pekerja tak dibayar/pekerja keluarga terutama yang bergerak disektor pertanian. Jumlahnya mencapai 3,3 ribu orang atau sekitar 19,78 persen dari total setengah menganggur terpaksa. Sektor lainya yang juga merupakan penyumbang setengah penganggur terpaksa adalah para buruh di sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan yang jumlahnya mencapai 2,6 ribu orang atau sekitar 15,49 persen.

Tabel 16. Setengah Menganggur Terpaksa Menurut Sektor dan Status Dalam Pekerjaan Utama, Tahun 2010

Sektor / Status pekerjaan	Berusaha sendiri	Berusaha dibantu buruh	Buruh	Pekerja bebas	Pekerja tak dibayar / pekerja keluarga	Jumlah
Primer	6.53	10.28	0.00	2.31	19.78	38.90
Sekunder	2.27	1.11	1.19	2.41	3.57	10.56
Tersier	11.12	3.95	26.07	3.37	6.04	50.54
Jumlah	19.92	15.34	27.26	8.09	29.39	100.00

Sumber: Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional

b. Setengah Menganggur Sukarela

Setengah menganggur sukarela merupakan pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (35 jam seminggu) tetapi tidak berusaha untuk mencari pekerjaan tambahan lainnya. Golongan ini merupakan golongan yang sudah merasa puas dengan kondisinya saat ini termasuk mereka yang tidak mungkin lagi mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha lain. Berdasarkan hasil Sakernas 2010 jumlah setengah menganggur sukarela mencapai 32 ribu orang atau sekitar 65,58 persen dari total setengah pengangguran.

Setengah menganggur sukarela didominasi oleh kaum perempuan yang mencapai 57,95 persen dari total setengah menganggur sukarela. Berbanding terbalik dengan setengah menganggur terpaksa yang terkonsentrasi di kelompok umur produktif, setengah menganggur sukarela justru terkonsentrasi di kelompok umur yang belum dan tidak lagi produktif yaitu di kelompok umur 15 – 19 tahun, dan 45 tahun ke atas. Dari sisi tingkat pendidikan, setengah menganggur sukarela sebagian besar merupakan pekerja-pekerja berpendidikan rendah (SD atau lebih rendah) yang mencapai 50,12 persen dan 27,80 persen saja yang berpendidikan SLTA ke atas.

Seperti halnya setengah menganggur terpaksa, sebagian besar setengah menganggur sukarela merupakan pekerja tak dibayar/pekerja keluarga yang umumnya bergerak di sektor pertanian. Jumlahnya mencapai 6,8 ribu orang atau sekitar 21,46 persen. Selain itu juga terdapat 15,11 persen buruh yang bergerak di sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan yang merupakan setengah menganggur sukarela

Tabel 17. Setengah Menganggur Sukarela Menurut Sektor dan Status Dalam Pekerjaan Utama, Tahun 2010

Sektor / Status pekerjaan	Berusaha sendiri	Berusaha dibantu buruh	Buruh	Pekerja bebas	Pekerja tak dibayar/pekerja keluarga	Jumlah
Primer	3.99	10.31	0.00	4.48	21.46	40.23
Sekunder	4.79	2.28	2.17	3.84	4.53	17.61
Tersier	6.29	5.24	17.65	1.21	11.78	42.16
Jumlah	15.06	17.82	19.81	9.53	37.78	100.00

Sumber: Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional

BAB VII KESIMPULAN

1. Seiring kenaikan harga barang, rata-rata pengeluaran perkapita penduduk menunjukkan kecenderungan meningkat dari Rp. 426,9 rb/kapita/bulan pada tahun 2006 menjadi Rp. 810,4 rb/kapita/bulan pada tahun 2010.
2. Selama lima tahun terakhir, penduduk Kabupaten Badung mengalokasikan sebagian besar pengeluarannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan.
3. Konsumsi untuk makanan didominasi oleh pengeluaran untuk konsumsi makanan jadi, sumber protein (ikan, daging, telur dan susu), serta padi-padian. Sementara konsumsi non makanan didominasi oleh pengeluaran untuk keperluan perumahan dan fasilitasnya serta kebutuhan transportasi.
4. Dalam periode 2009 – 2010 terjadi peningkatan kesenjangan pendapatan yang ditandai dengan meningkatnya nilai indeks *Gini Ratio* dari 0,2273 pada tahun 2009 menjadi 0,2863 pada tahun 2010. Hal ini juga didukung dengan menurunnya porsi pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah dari 25,49 persen pada tahun 2009 menjadi 22,26 persen pada tahun 2010.
5. Selama empat tahun terakhir jumlah penduduk usia kerja dan jumlah angkatan kerja terus meningkat secara signifikan. Tetapi tingkat partisipasi angkatan kerja relatif stabil di kisaran 75 persen. Meskipun demikian jumlah pengangguran terbuka terus menurun secara signifikan.

6. Namun perlu diwaspadai adanya peningkatan jumlah setengah pengangguran selama empat tahun terakhir yang berkontribusi menambah beban pelaksanaan program pembangunan. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Badung perlu mengantisipasi kecenderungan peningkatan total pengangguran yang terdiri dari pengangguran terbuka dan setengah menganggur terpaksa.
7. Pekerja di Kabupaten Badung masih didominasi kaum laki-laki yang terkonsentrasi di kelompok umur 25 – 44 tahun. Sektor perdagangan, hotel dan restoran masih menjadi primadona yang berhasil menyerap sebagian besar pekerja. Tenaga kerja di Kabupaten Badung merupakan tenaga kerja terdidik yang lebih memilih bekerja sebagai buruh daripada membuka lapangan usaha sendiri. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya proporsi tenaga kerja yang berstatus berusaha dibandingkan dengan berstatus buruh.
8. Pengangguran juga masih didominasi oleh kaum laki-laki yang distribusinya hampir merata di seluruh kelompok umur. Tingginya tingkat pengangguran terdidik memperkuat indikasi adanya *mismatch* antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja serta minimnya jiwa kewirausahaan diantara para lulusan perguruan tinggi sehingga mereka cenderung mencari pekerjaan ketimbang membuka lapangan usaha sendiri.
9. Sebanyak 15,74 persen tenaga kerja merupakan setengah pengangguran yang bekerja di bawah jam kerja normal (35 jam seminggu). Setengah pengangguran terdiri dari setengah menganggur terpaksa dan setengah menganggur sukarela.
10. Setengah menganggur terpaksa didominasi kaum perempuan yang terkonsentrasi di kelompok umur produktif yaitu 25 – 44 tahun. Mereka

umumnya merupakan pekerja terdidik yang sebagian besar merupakan pekerja tak dibayar/pekerja keluarga dan buruh yang bergerak di sektor pertanian dan jasa.

11. Setengah menganggur sukarela juga didominasi oleh kaum perempuan yang terkonsentrasi di usia tidak produktif yaitu 15 -19 tahun dan 45 tahun ke atas. Sayangnya mereka sebagian besar berpendidikan rendah (berijazah SD atau lebih rendah) dan bekerja sebagai pekerja tak dibayar/pekerja keluarga yang bergerak di sektor pertanian dan jasa.

<http://badungkab.bps.go.id>

<http://badungkab.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung
Jl. Mulawarman No. 11 Denpasar 80111
Telp : (0361) 437519, Fax : (0361) 411887
E-mail : bps5103@telkom.net